

RENCANA KERJA (RENJA)

2025



PEMERINTAH KOTA BANJAR

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR**

KATA PENGANTAR

Perencanaan adalah suatu proses sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. telah dipahami secara umum bahwa 'gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan'.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana kerja merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Banjar, 05 Juli 2025
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kota Banjar



H. SRI SOLARIAH, SE, M.E, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19740423 199902 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

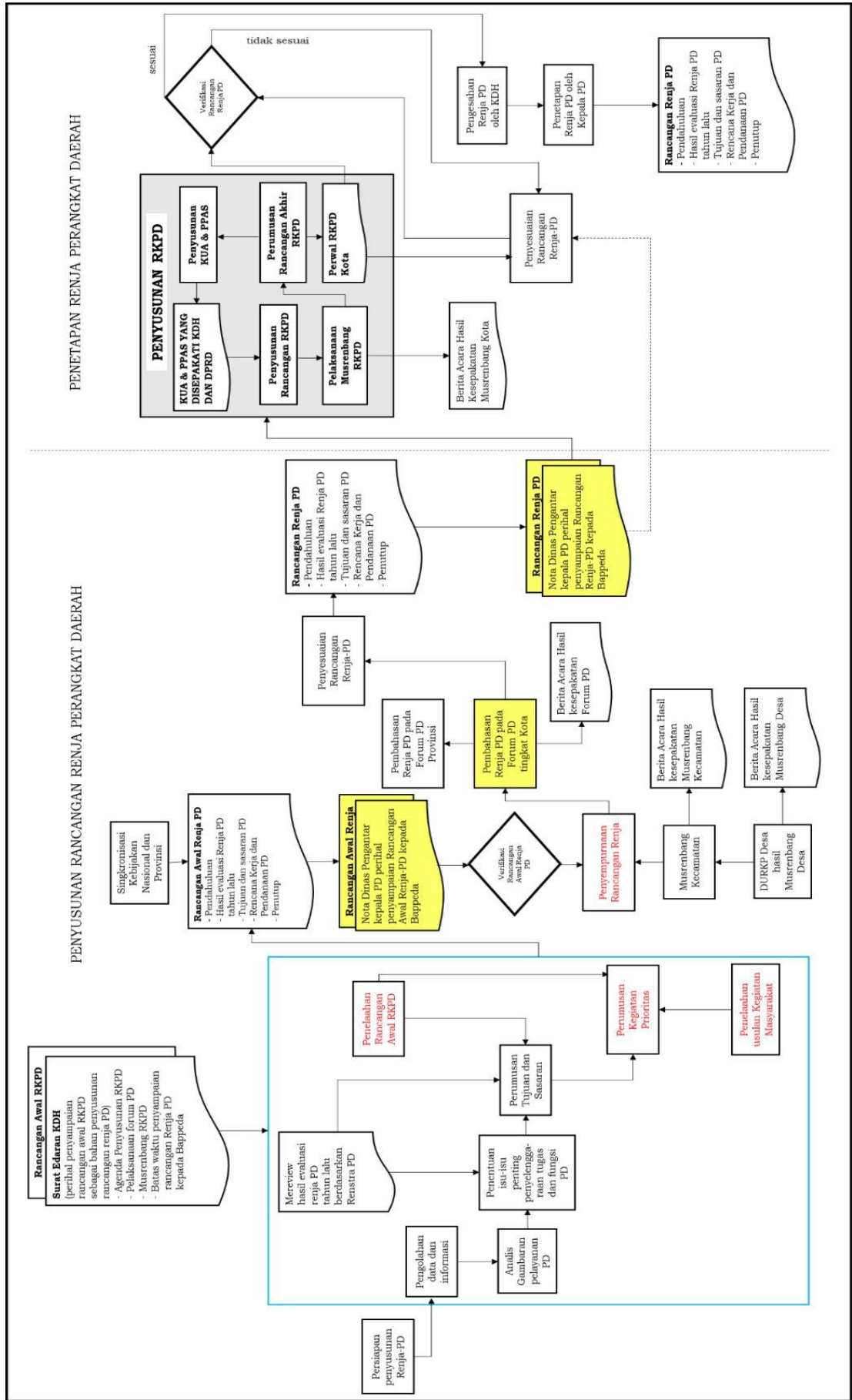
Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD dibawah ini bagan alir proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah :

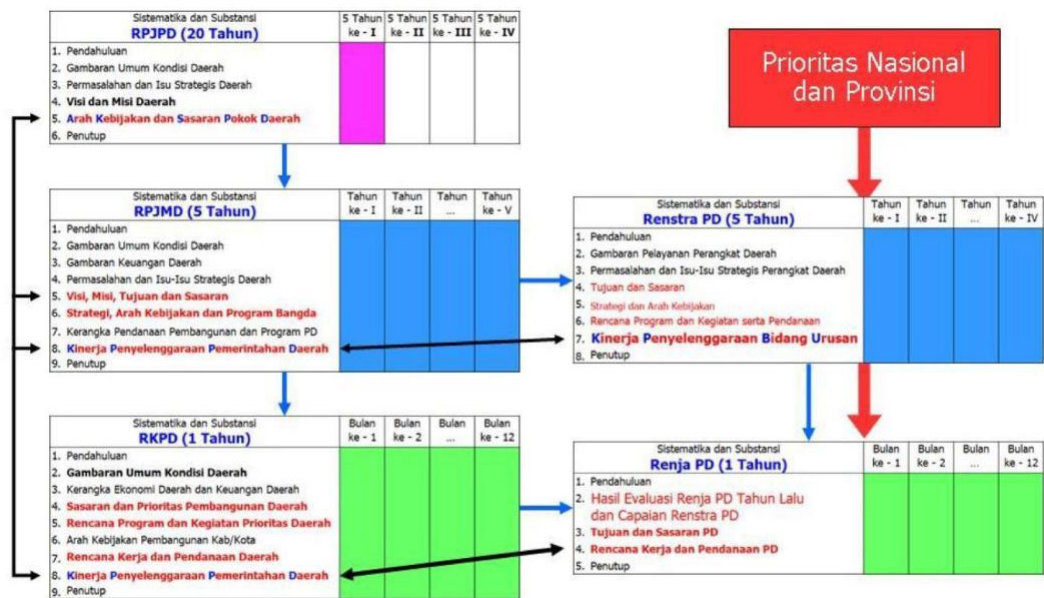
Gambar 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Gambar 2

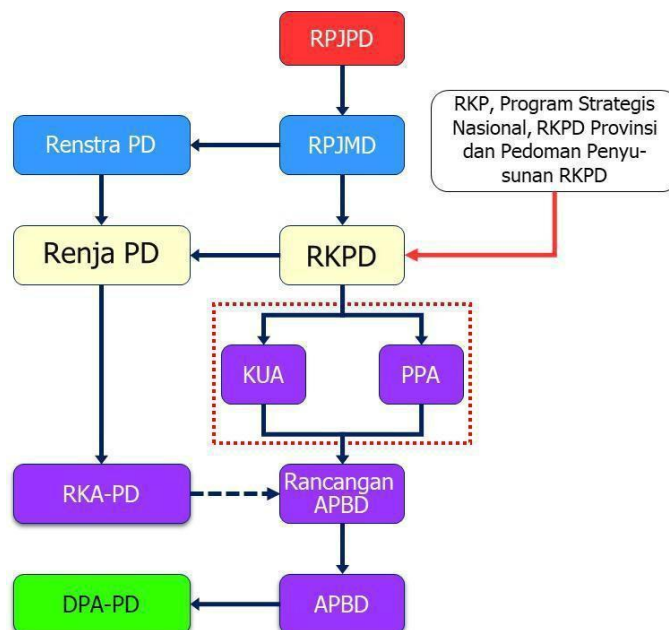
Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

Gambar 3

Tindaklanjut Rencana Kerja dengan proses penyusunan RAPBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan antara lain :

1. UU RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang ditetapkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8. UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
9. UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016

- Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 33);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Banjar di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2025 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2025 dan RPD Kota Banjar di tahun 2025;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Serta Perindustrian dan laporan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian rancangan Rencana Kerja OPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja OPD, proses penyusunan Rencana Kerja OPD, keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium DevelopmnetGoals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan berdasarkan target indikator kinerja program Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 68,75 %

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan capaian 67,55 %

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian 96,69 %

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi capaian 99,53 %

Program Pendidikan dan Latihan Koperasi capaian 99,97 %

Program Pengembangan UMKM capaian 100 %

Program Pengembangan Ekspor capaian 100 %

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting capaian 99,78 %

Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen capaian 97,26 %

Program Pengendalian Izin Usaha Industri capaian 97,92 %

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :
 - 1) Menjadi tidak optimalnya pelayanan capaian kinerja Dinas
 - 2) Tidak terserapnya anggaran
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut :
 - 1) Tercapainya kinerja dinas dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal.
 - 2) Tersampainya hak masyarakat dalam peningkatan kapasitas.
 - 3) Tercapainya tujuan usaha peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan misi pemerintah Kota Banjar

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - 1) Optimalisasi perencanaan alokasi anggaran dan sumber daya manusia.
 - 2) Peningkatan sinergitas dengan instansi lain.
- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - 1) Mempertahankan capaian kinerja.
 - 2) Optimalisasi sinergitas dan koordinasi dengan instansi lain.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 (tahun berjalan), sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025 (tahun berjalan)

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2026 (AKhir Periode Renstra RPD OPD 2024-2026)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Tahun lalu 2023 (n-2)			Target kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Renstra (%)	Realisasi Capaian Program dan Keluaran Kegiatan s/d Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan								
Keg	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	300%					100%	100%	
Keg	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok					2 dok	2 dok	33,33
Keg	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dok					2 dok	2 dok	33,33
Keg	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dok					2 dok	2 dok	33,33
Sub Keg	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	24 lap					8 lap	8 lap	33,33
Sub Keg	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 lap					4 lap	4 lap	33,33
Keg	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	300%					100%	100%	
Sub Keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang / tahun					53 Orang / tahun	53 Orang / tahun	33,33
Sub Keg	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6 lap					2 lap	2 lap	33,33
Keg	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan	300%					100%	100%	
Sub Keg	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 dok					5 dok	5 dok	33,33
Keg	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300%					100%	100%	
Sub Keg	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan kantor yang Disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Sub Keg	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 lap					12 lap	12 lap	33,33

Keg	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300%					100%	100%	33,33
Sub Keg	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 paket					4 paket	4 paket	33,33
Sub Keg	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 unit					5 unit	5 unit	33,33
Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300%					100%	100%	
Sub Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap					12 lap	12 lap	33,33
Sub Keg	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 lap					12 lap	12 lap	33,33
Keg	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	300%					100%	100%	
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit / tahun					15 unit / tahun	15 unit / tahun	33,33
Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	16 unit / tahun					16 unit / tahun	16 unit / tahun	33,33
Sub Keg	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit / tahun					4 unit / tahun	4 unit / tahun	33,33
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit / tahun					4 unit / tahun	4 unit / tahun	33,33
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit / tahun					4 unit / tahun	4 unit / tahun	33,33
Sub Keg	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit / tahun					4 unit / tahun	4 unit / tahun	33,33
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			21,98%							
Keg	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota								
Sub Keg	Pelaksanaan Proses pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan	120 Unit Usaha					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	33,33
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI			38,46%							
Keg	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								
Sub Keg	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	75 Unit Usaha					25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	33,33

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI		Cakupan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		82,42%								
Keg	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Perkoperasian		150 Orang						50 Orang	50 Orang	33,33
Sub Keg	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Cakupan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		0,00%								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		90 Unit Usaha						30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	33,33
Keg	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif bernilai tambah, memiliki akses Pasar, akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha										
Sub Keg	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		9,00%								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKMK)		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro										
Keg	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra										
Sub Keg	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan										
Sub Keg	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		6 Unit Usaha						2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	33,33
Sub Keg	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan		300 Unit Mikro						0	0	0
Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan Terhadap Usaha		375 Unit Usaha						0	0	0
Sub Keg	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKMK serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKMK dan Kewirausahaan	Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		90 Orang						29 Orang	29 Orang	32,22
Sub Keg	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKMK serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKMK dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		150 Orang						50 Orang	50 Orang	33,33
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKMK		Cakupan Pengembangan UMKMK		3,00%								
Keg	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Presentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Naik kelas)										
Sub Keg	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKMK yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, Pemasaran, SDM,serta desain dan Teknologi		90 Unit Usaha						30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	33,33
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		100,00%								
Keg	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										

	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50,00%						
Keg	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%						
Sub Keg	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Perda RPIK)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Perda RPIK)	3 dok				1 dok		33,33
Sub Keg	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	3 dok				0	0	0
Sub Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, sarana dan Prasarana industri	3 dok				0	0	0
Sub Keg	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 dok				1 dok	1 dok	33,33
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	5,00%						
Keg	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait							
Sub Keg	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3 dok				1 dok	1 dok	33,33
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		50,00%						
Keg	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	50%				50%	50%	
Sub Keg	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	3 dok				1 dok	1 dok	33,33

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksana kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas koperasi, usaha mikro, kecil menengah dan perdagangan;
- e. Pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Sumber Daya manusia

Untuk menunjang kelancaran tugas pekerjaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pegawai yang tersedia sebanyak 36 orang tenaga PNS, 15 orang tenaga PPPK dan dibantu oleh 75 orang tenaga Non PNS, adapun rincian keadaan pegawai sebagai berikut :

Tabel 2

Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan
1	Hj. Sri Sobariah, SE, ME, MM 19740423 199902 2 001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas
2	Neneng Widiya Hastuti, S.Sos, M.Si 19750124 200312 2 003	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	Ina Rosnidar Suhlya, SH, M. Si 19700306 200312 2 002	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Koperasi dan UKM
4	Riyanti Savitrie, S.IP,M.Si 19780129 200801 2 016	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perdagangan
5	Yadi Suryadi Praja, S.Sos., M. Ap 19830226 200801 1 003	Penata Tk. I,III/d	Kepala Bidang Perindustrian
6	Ismayati,SP,MM 19770817 200604 2 027	Pembina, IV/a	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
7	Ago Wijaya, SE, MM 19750917 200801 1 004	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Koperasi Muda
8	Dewi Paramita Mayashanti, SE.,MM 19770515 200801 2 020	Penata Tk. I,III/d	Pembina Industri Muda
9	Bahria Ibrahim, S.IP 19710502 199403 2 004	Penata Tk. I,III/d	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda
10	Hendra Gunawan, SE, M.Ap 19800228 200501 1 009	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
11	Budiana Hamzah,SE 19800314 201001 1 005	Penata Tk. I,III/d	Analisis Kebijakan Muda
12	Okta Rosmaliatini, S.Farm,MM 19861001 201001 2 006	Penata Tk. I,III/d	Pengawas Metrologi Muda
13	Eka Komara ,S.Hut,M.Si 19830224 200604 1 004	Penata Tk. I,III/d	Kepala UPTD Metrologi Legal
14	Sri Hasrina Husni,S.IP 19730329 200312 2 003	Penata Tk. I, III/b	Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan
15	Tarwi, A.Md 19760606 200801 2 018	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Pasar
16	Agus Ribhan Murtado, A.Md.Kom 19780820 200901 1 006	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Teknik Informasi
17	Nurhayati, S.Ip, MM 19800505 200312 2 010	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Industri
18	Astri Agustin, S.IP, MM 19850831 200604 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur
19	Lestari Handayani, A.Md 19811231 201001 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengelola Bahan Perencana
20	Lina Elia 19700103 200312 2 003	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Penerimaan
21	Dian Permatasari 19841109 200312 2 001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan
22	Erawan Safari, S.IP 19790114 200901 1 005	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
23	Bondan Prasetyo, ST 19940525 202012 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri
24	Trimo Riyadi 19660126 200604 1 004	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
25	Nansy Afrihandini, S.IP 19880428 202203 2 001	Penata Muda, III/a	Penyuluh Koperasi
26	Mugni Herlambang, ST 19940623 202203 1 009	Penata Muda, III/a	Analisis Industri

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan
27	Nathasya Cornelya Khairunissa, S.Si 19981113 202203 2 004	Penata Muda, III/a	Penera Ahli Pertama
28	Solihin 19730105 200701 1 008	Penata Muda, III/a	Bendahara
29	Cecep Wartono 19781119 200701 1 015	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum
30	Trisnayadi 19671012 200701 1 015	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Identifikasi Evaluasi Sentra Pengelolaan Produk
31	Rukim Rohmana 19741028 200701 1 004	Penata Muda, III/a	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
32	Budianto 19760504 200801 1 007	Pengatur Tingkat I, II/b	Pengadministrasi Umum
33	Dian Herdiana 19780126 200801 1 003	Pengatur Tingkat I, II/b	Pengadministrasi Umum
35	Eli Nureli 19660614 200604 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
36	Aam 19751228 200604 1 007	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
37	Yoyo Hidayat 19680511 200701 1 015	Pengatur, II/c	Pengadministrasi Umum
38	Wanda Karunia Fidiyanto, A,Md. M 19980311 202203 1 010	Pengatur Muda, Tk. I, II/d	Penera Terampil
39	Fahmi Daniarsyah, SE 19830514 202321 1 005	IX	Pengawas Koperasi
40	Sanni Safardini, SE 19871022 202321 2 031	IX	Analisis Perdagangan
41	Ayi Suryaman, S.IP 19890803 202321 1 013	IX	Analisis Perdagangan
42	Pringgo Gautama, SE 19940901 202321 1 004	IX	Pengawas Koperasi
43	Widya Maulidi, SE 19950825 202321 2 027	IX	Pengawas Koperasi
44	Solihin 19780101 202321 1 008	V	Pengamat Tera
45	Tarsono 19780823 202321 1 002	V	Pengamat Tera
46	Ajang Dindin 19811215 202321 1 004	V	Pengamat Tera
47	Erni Herliani 19860101 202321 2 058	V	Pengamat Tera
48	Aas Nasrulloh Bahruddin, ST 19820207 202321 1 012	IX	Pembina Industri
49	Lilis Muhliso Nurjanah, S.IP 19860218 202321 2 040	IX	Analisis SDM Aparatur
50	Tirani Noor Arini, S.Kom 19930330 202321 2 048	IX	Pranata Komputer
51	Ela Nurlatifah, S.IP 19930811 202321 2 039	IX	Perencana
52	Ade Yosep Bastian 19891001202321 1 019	V	Pengamat Tera
53	Dodi Mulyadi, S.T. 197912072024211001	IX	Pengawas Kemetrolgian

Tabel 3

Pegawai Non PNS Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Bayu Komara	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
2	Jamal Akrom, S.IP	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
3	Asep Ridwan Taufik, ST	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
4	Adhityo Hendrawan, SH	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
5	Endang Kardiana, SE	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
6	Agus Fajar, S.IP	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
7	Ihat Solihati, S.IP	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
8	Yunita Cahya Sumirat, S.Ak	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
9	Lisna Fitriani, SE	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
10	Ajiasa Rasyidin	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
11	Rima Andini	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
12	Haris Pitoyo	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
13	Kohar	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
14	Wiwin Sri Mulyati, S.Ip	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
15	Junjun Ahmad	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
16	Pendi	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
17	Dian Rusdiana	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
18	Asep Sidiq Al Ghofiqi, S.Ip	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
19	Muhammad Rizky Fidzkrillah	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
20	Nurul Fadilah Islami, S.Ip	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
21	Rona Setiawan	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
22	Febri Safari Rahayu	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
23	Ida Diani,Se	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
24	Eva Nurhayati, Se	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
25	Ita Kurniasih, S.Ip	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
26	Silvia Dwi Paluvi, S.Ip	Pelaksana Teknis/administrasi Perkantoran
27	Toyo	Penyediaan jasa kebersihan kantor
28	Dede Jayusman	Penyediaan jasa kebersihan kantor
29	Tuti Suningsih	Penyediaan jasa kebersihan kantor
30	Nino Turisno Arsan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
31	Ikbal Nurpadilah	Penyediaan jasa kebersihan kantor
32	Gunawan Wastopa	Penyediaan jasa kebersihan kantor
33	Bambang Bungsu	Penyediaan jasa kebersihan kantor
34	Rusli	Penyediaan jasa kebersihan kantor
35	Rusmana	Penyediaan jasa kebersihan kantor
36	San Miarso	Penyediaan jasa kebersihan kantor
37	Ruslan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
38	Sadia	Penyediaan jasa kebersihan kantor
39	Sumarko	Penyediaan jasa kebersihan kantor
40	Nuryadi	Penyediaan jasa kebersihan kantor
41	Iwan Sunarlan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
42	Didin Rosidin	Penyediaan jasa kebersihan kantor
43	Warsono	Penyediaan jasa kebersihan kantor
44	Engkus Kustiawan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
45	Dadang Kurdian	Penyediaan jasa kebersihan kantor
46	Warisman	Penyediaan jasa kebersihan kantor
47	Riyan Saepul Rachman	Penyediaan jasa kebersihan kantor
48	Ranran Suryana	Penyediaan jasa kebersihan kantor
49	Regi Rian Rinaldi	Penyediaan jasa kebersihan kantor
50	Dira Kurniawan	Penyediaan jasa kebersihan kantor
51	Taufik Nurdiansyah	Penyediaan jasa kebersihan kantor
52	Yayat Ruhiyat	Penyediaan jasa kebersihan kantor
53	Ikin Kurdiana	Penyediaan jasa kebersihan kantor

No	Nama	Jabatan
54	Dudy Riyadi	Penyediaan jasa kebersihan kantor
55	Heri Heryadi	Penyediaan jasa kebersihan kantor
56	Yogi Irwan	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
57	Ade Andris Sumirat	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
58	Roni Hidayat	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
59	Aceng Gunawan	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
60	Rusdiana	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
61	Jejen Jenal Mutakin	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
62	Saep Maulana	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
63	Tedi Muhtadin	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
64	Asep Hermawan	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
65	Andi Kurniawan	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
66	Mediyanto	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
67	Sulaeman	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
68	Ngadio	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
69	Liwon	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
70	Ngadiman	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
71	Basiran	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
72	Rizky Pratama, S.Ip	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
73	Dedi	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
74	Irvan Sachril	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
75	Heru Santoso	Penyediaan Jasa Keamanan kantor
76	Dimas Anwar	Penyediaan Jasa Keamanan kantor

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar sampai dengan Desember 2023 berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil, PPPK Dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang Dan Jenis Kelamin

GOL./RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUS TRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	3
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	2	-	3	-	4	1	1	1	10	2	12
III/b	-	5	-	1	-	1	-	-	-	7	7
III/c	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
III/d	-	-	-	1	2	2	2	-	4	3	7
IV/a	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	4
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1

GOL./RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUS TRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
V	-	-	-	-	4	1	-	-	4	1	5
IX	-	3	1	-	2	1	2	1	5	5	10
Pegawai Tidak Tetap	3	3	2	1	59	5	1	1	65	10	75
JML	9	14	7	2	75	10	6	4	97	30	127
TOTAL	23		9		85		10		127		

Kondisi Pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota berdasarkan pendidikan dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honoror Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG PERINDUS TRIAN		BIDANG PERDAGANGAN		BIDANG KOPERASI DAN UKM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	1	-	-	14	-	-	-	14	1	15
SLTP/MTS	2	-	-	-	6	-	-	-	8	-	8
SLTA/MA	3	1	1	-	48	-	1	-	53	1	54
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	1	1	-	-	-	2	-	-	1	3	4
S1	1	6	4	1	6	8	4	3	15	18	33
S2	-	4	1	2	1	2	2	1	4	9	13
JUMLAH	7	13	6	3	75	12	7	4	95	32	127
TOTAL	20		9		87		11		127		

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2023)

Jumlah SDM yang tersedia dirasa masih kurang khususnya dalam jumlah PNS, mengingat tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tetap berupaya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar didukung sarana dan prasarana sebagaimana **Tabel** berikut:

TABEL 6
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANJAR
TAHUN 2023

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	BUS (Penumpang 30 Orang Ke atas)	1	Unit
2	MINI BUS (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	6	Unit
3	TRUCK + ATTACHMENT	1	Unit
4	MOBIL UNIT PAMERAN	1	Unit
5	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA LAIN-LAIN	2	Unit
6	SEPEDA MOTOR	22	Unit
7	GEROBAK TARIK	1	Unit
8	GEROBAK DORONG	6	Unit
9	SEPEDA	2	Unit
10	PERKAKAS BENGKEL KONTRUKSI LOGAM LAIN-LAIN	1	Unit
11	TOOL KIT SET	1	Unit
12	TANG	4	Unit
13	LANDASAN CAP LENGKAP	2	Unit
14	BEJANA UKUR	6	Unit
15	ALAT TIMBANGAN LAIN – LAIN	9	unit
16	ANAK TIMBANGAN BIDUR	80	unit
17	MESIN KETIK MANUAL PORTABLE	1	unit
18	MESIN KETIK ELEKTRONIK	1	unit
19	FILING BESI/METAL	10	unit
20	LEMARI KAYU	1	buah
21	ALAT PENGHANCUR KERTAS	1	buah
22	PAPAN NAMA INSTANSI	6	buah
23	PAPAN PENGUMUMAN	1	buah
24	PAPAN TULIS	1	buah
25	ALAT DETEKTOR UANG PALSU	4	buah
26	ALAT PEMOTONG KERTAS	2	buah
27	OVERHEAD PROJEKTOR	2	buah
28	LEMARI KAYU	21	buah
29	MEJA KAYU/ROTAN	5	buah
30	KURSI BESI/METAL	4	buah
31	MEJA RAPAT	2	buah
32	MEJA KERJA	91	buah
33	KURSI RAPAT	16	buah
34	KURSI PUTAR	9	buah
35	KURSI TAMU	1	buah
36	BANGKU TUNGGU	2	buah
37	MEJA KOMPUTER	2	buah
38	TENDA	1	paket
39	SOFA	6	set
40	MOUBILER LAINNYA	1	buah
41	LEMARI ARSIP	6	buah
42	KURSI KERJA	1	buah
43	LEMARI ES	1	buah

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
44	AC UNIT	9	unit
45	ALAT PENDINGIN LAIN – LAIN	1	paket
46	KIPAS ANGIN	10	buah
47	RADIO	1	buah
48	TELEVISI	1	buah
49	SOUND SYSTEM	1	Unit
50	STABILISATOR	1	buah
51	TANGGA ALUMUNIUUM	1	buah
52	DISPENSER	2	buah
53	MIMBAR/PODIUM	1	buah
54	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	10	buah
55	GENSET	1	buah
56	TONG SAMPAH	10	buah
57	ALAT PEMADAM PORTABLE	22	buah
58	ALAT PEMBANTU PEMADAM KEBAKARAN	1	buah
59	PC UNIT	6	unit
60	LAP TOP	12	buah
61	DEKSTOP	1	buah
62	HARD DISK	1	buah
63	PRINTER	13	buah
64	SCANNER	1	buah
65	PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN	1	buah
66	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	1	buah
67	KURSI PEJABAT ESELON II	3	buah
68	KURSI KERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL	14	buah
69	KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
70	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAS	1	buah
71	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT LAIN-LAIN	1	buah
72	MICROPHONE/WIRELESS MIC	1	buah
73	PERALATAN STUDIO VISUAL LAIN-LAIN	12	unit
74	CCTV	1	unit
75	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM LAIN-LAIN	1	unit
76	CAMERA ELEKTRONIK	1	Unit
77	SOUND SYSTEM	1	unit
78	HANDY TALKY	3	buah
79	FACSIMILE	1	buah
80	TIMBANGAN ELEKTRONIK	7	buah
81	FREZZER	1	buah
82	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13	buah
83	ANAK TIMBANGAN	31	buah
84	GELAS UKUR	2	buah
85	VACUUM SYSTEM	1	buah
86	TRIPOD	2	buah
87	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	2	unit
88	BANGUNAN GEDUNG KANTOR LAIN-LAIN	1	unit
89	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI LAIN-LAIN	2	unit
90	GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	4	unit
91	BANGUNAN TEMPAT KERJA LAIN -LAIN	1	unit
92	TUGU/TANDA BATAS LAIN-LAIN	1	unit
93	INSTALASI AIR BERSIH LAIN-LAIN	1	unit
94	INSTALASI AIR KOTOR LAIN-LIAN	1	unit
95	JARINGAN PEMBAWA LAIN-LAIN	1	unit
96	JARINGAN DISTRIBUSI LAIN-LAIN	2	unit
97	JARINGAN TELEPON DI ATAS TANAH KAPASITAS SEDANG	1	unit

Sumber: bendahara barang (Desember 2023)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sudah mencukupi. Namun demikian masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang dan memerlukan tambahan fasilitas antara lain gedung kantor yang sudah tidak representatif serta gedung-gedung pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang masih belum tersedia seperti Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal, rumah kemasan, dll.

2.2.3. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka optimalisasi pelayanan tugas pokok dan fungsi dinas kepada masyarakat serta upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pelayanan dinas, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar akan melaksanakan beberapa program inovasi dinas antara lain :

a. Petruk Pakde (Pelayanan Tera Ulang Keliling Pasar Kelurahan dan Desa)

Petruk Pakde adalah kegiatan pelaksanaan Tera Ulang melalui pemanfaatan mobil metrologi legal yang memberikan pelayanan tera ulang berkeliling ke pasar, kelurahan dan desa secara terjadwal, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang akan melakukan tera ulang alat UTTP nya.

2.2.4. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan urusannya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2024 - 2026, indikator sasaran dinas dan indikator kinerja kunci yang diacu dalam pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah meliputi :

1. Indikator Nilai Sakip Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2023 tercapai nilai BB.
2. Indikator koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah total Koperasi di Kota Banjar di kali 100%. Koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki aktifitas,

selama tahun 2023 jumlah koperasi yang melakukan aktifitas berjumlah 58 koperasi dari total 99 koperasi di Kota Banjar dengan demikian koperasi aktif di kota Banjar $58 \text{ koperasi} / 99 \text{ Koperasi} \times 100 = 58,58\%$.

3. Indikator koperasi berkualitas adalah perbandingan jumlah koperasi berkualitas dibandingkan dengan jumlah total koperasi di Kota Banjar di kali 100%. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang pada tahun 2023 melaksanakan RAT, mengalami pertumbuhan asset, mengalami peningkatan volume usaha. Koperasi berkualitas di Kota Banjar Tahun 2023 berjumlah 20 koperasi dari total 99 Koperasi. Dengan demikian koperasi berkualitas di Kota Banjar $20 \text{ Koperasi} / 99 \text{ Koperasi} \times 100 = 20,20\%$.
4. Indikator pertumbuhan jumlah usaha mikro adalah jumlah pertumbuhan usaha mikro di Kota Banjar Tahun 2023. Pada tahun 2023 Target Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 15 % dapat terealisasi sebesar 15,61 %.
5. Indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) Sembilan bahan pokok adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun dasar dibandingkan dengan harga sekarang dikali 100. Indek harga konsumen tahun 2023 adalah perbandingan antara rata-rata harga Sembilan bahan pokok pada akhir Desember 2022 (tahun dasar) dibandingkan dengan harga rata-rata Sembilan bahan pokok pada akhir Desember 2023 dikali 100.
Target tahun 2022 Indeks harga Konsumen Sembilan Bahan Pokok sebesar 115% dapat terealisasi sebesar 114,96% sehingga capaian adalah sebesar 99,97%
6. Indikator Persentase laju pertumbuhan ekspor adalah perbandingan antara pertumbuhan nilai ekspor pada tahun n dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun n-1 dikali 100%.
7. Target indicator % Pertumbuhan Nilai Ekspor tahun 2023 sebesar 0,10%, target ini tidak dapat tercapai malah -59,02, capaian -59.018,45 . Capaian sangat rendah karena pada tahun 2023 terjadi penurunan permintaan dari Buyer dan harga nya pun murah jadi nilai ekspor tahun 2023 adalah sebesar US \$ 22.687.175,43 sedangkan nilai eksport pada tahun 2022 adalah US\$ 36.076.795,28 dengan demikian terjadi penurunan sebesar US \$ 13.389.619.85, dari tahun 2022. sehingga persentase indicator pertumbuhan nilai ekspor adalah $= 22.687.175,43 - 36.076.795,28 / 36.076.795,28 \times 100\% = - 37,11\%$.
8. Indikator Persentase pertumbuhan IKM pengolahan formal, Target Tahun 2023 untuk indicator % Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin sebesar 10,26%.
Pada 2023 data industri berdasarkan dari data SIINAS dengan ketentuan kalasifikasi usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin No 64/2016). Pada tahun 2022 jumlah IKM sebanyak 39 unit dan pada tahun 2023 menjadi 44., terdapat penambahan IKM yang berizin sebanyak 4 IKM sehingga persentase pertumbuhan IKM pengolahan yang berizin adalah $4 \text{ IKM} / 39 \text{ IKM} \times 100 = 10,26\%$

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat daerah			Realiasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP OPD	70,3	70,35	70,4	71,23	75,23	76,21	Sudah tercapai
2	% Koperasi Berkualitas	21/97	22/97	23/97	20/99			
		21,64%	22,68%	23,71%	20.20%	20.20%	21,21%	Sudah tercapai
3	% Pertumbuhan Usaha Mikro	5	5	5	15,61		5	
4	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	59,5	60	60,5	-	60	60	
5	% Pertumbuhan Nilai Ekspor	-1	0,3	0,5	-37.11	0,0%	0,3	
6	% Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar	5	5	5	-	5	5	
7	% meningkatnya Investasi IKM di Kota Banjar	5	5	5	-	5	5	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan dan isu strategis daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada tabel 7 Pencapaian Kinerja

Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik, dengan mayoritas program dan kegiatan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, hanya terdapat beberapa indikator yang tidak dapat tercapai.

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera,
- b. Belum lengkapnya peralatan standar untuk pengujian alat UTTP dan gedung kemitrologian pelayanan tera, tera ulang.
- c. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha Koperasi dan industri yang masih perlu ditingkatkan;
- d. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
- e. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
- f. Permodalan yang dimiliki pelaku usaha relatif terbatas;
- g. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat-tempat strategis belum tertata dengan optimal;
- h. Motivasi dan sikap mental wirausaha rendah;
- i. Masih terbatasnya pemasaran Produk KUKM;
- j. Kurangnya pengembangan usaha koperasi;
- k. Lambatnya pengelolaan dan ketersediaan data di BPS

3. Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan Dampak Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan, antara lain :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang kuat dalam mendukung Visi dan Misi pemerintah Kota Banjar, khususnya misi 2.

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan tujuan membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif, sasarannya meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat melalui indikator khususnya PDRB per Kapita dan Tingkat inflasi daerah. Serta Misi 6. Mengembangkan daya tarik dan Potensi Daerah dengan tujuan menjadikan Kota Banjar Sebagai daerah Tujuan Wisata, Sasaran Meningkatnya Potensi daerah Berbasis Agropolitan dengan indikator sasaran khususnya Jumlah Produk Unggulan Daerah.

Dukungan terhadap misi Pembangunan daerah Kota Banjar, dilakukan melalui penetapan tujuan dan sasaran dinas yang sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Banjar. Misi 3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah didukung melalui sasaran dinas antara lain : Sasaran Dinas 2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan UMKM dengan indikator Persentase koperasi aktif, Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase pertumbuhan jumlah usaha mikro. Dan sasaran dinas 3. Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Kota Banjar dengan indikator Indeks Harga Konsumen, Persentase Laju Pertumbuhan Ekspor dan Persentase Cakupan UTP yang di Tera dan Tera Ulang. Misi 6 Mengembangkan daya tarik dan Potensi Daerah didukung melalui sasaran Dinas 4. Meningkatnya Daya Saing IKM dengan indikator Persentase Pertumbuhan IKM Pengolahan yang berizin, Jumlah Produk Unggulan dan Jumlah kampung Produktif.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
Memperhatikan Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya, disimpulkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :
 - (1) Pelayanan Bidang Perindustrian :
 - a. Kualitas Sumber daya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
 - b. Kuantitas dan kualitas Bahan baku yang masih belum memadai;
 - c. Kuantitas dan kualitas produk yang masih belum memadai sehingga daya saingnya masih belum maksimal;
 - d. Masih perlunya analisis dampak lingkungan dari kegiatan perindustrian;

- e. Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif;
 - f. Belum adanya kawasan industri.
- (2) Pelayanan Bidang Perdagangan
- a. Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - b. Belum optimalnya kemampuan SDM pelaku usaha baik dalam manajemen, organisasi, kewirausahaan, teknologi, keuangan dan pemasaran.
 - c. Belum optimalnya pemahaman produsen dan konsumen dalam hal aturan/regulasi dunia usaha.
 - d. Lemahnya jaringan pemasaran untuk penjualan produk.
 - e. Keterbatasan Jaringan kerjasama dalam berusaha
- (3) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :
- a. Tuntutan Masyarakat terhadap produk UMKM yang berkualitas;
 - b. Persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar bebas yang menuntut produk Kota Banjar untuk memiliki daya saing yang tinggi;

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, meliputi:

- (1) Pelayanan Bidang Perindustrian
- a. Posisi strategis Kota Banjar mempermudah dalam memasarkan produk-produk unggulan lokal;
 - b. Terbukanya peluang pasar yang memasuki pasar bebas;
 - c. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM /KUKM;
 - d. Tersedianya potensi usaha.
- (2) Pelayanan Bidang Perdagangan
- a. Letak geografis Kota Banjar yang Strategis dan semakin meningkatnya minat masyarakat luar Kota Banjar untuk bertransaksi di Kota Banjar;
 - b. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui diklat, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;
 - c. Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah;
 - d. Kebutuhan bahan baku yang tinggi.

(3) Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

- a. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas/Kompetensi para pelaku usaha UMKM
- b. Adanya fasilitasi sarana/prasarana untuk perluasan pangsa pasar
- c. Pengembangan koperasi berbasis agro sebagai kelembagaan Agribisnis

5. Formulasi isu-isu penting

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha, meliputi keahlian di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran ;
3. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ;
4. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM;
5. Peningkatan daya saing dan Produk Unggulan;
6. Stabilisasi harga bahan pokok
7. Perdagangan elektronik (*e-commerce*)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Proses yang dilakukan dalam review terhadap rancangan awal RKPD yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut dilakukan adalah dalam upaya mensinergikan perencanaan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Kota Banjar dengan hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah.

Dari hasil review yang dilaksanakan terdapat beberapa program kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra namun karena hal ini penting sehingga dimasukkan pada Rencana Kerja tahun ini, begitupun pada pagu indikatif sudah tentunya ini pasti terdapat penyesuaian terhadap kondisi keuangan dan target kinerja,

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 8 berikut :

Tabel 1
Hasil riviw terhadap rancangan awal RKPD

NO	KODE REK	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)
1	2	TOTAL	4	5	6	7	3	5	6	7
						11.917.278.364	TOTAL			9.207.351.424
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	SEKRETARIAT				8.176.366.810	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.549.910.799
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.836.100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.500.000
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUSI	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	2.644.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok.	3.000.000
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUSI	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2.648.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	2.500.000
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUSI	Tersedianya RKA Perubahan tahun	1 dok.	2.489.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	2.500.000
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUSI	Tersedianya DPA Murni RKPD	1 dok.	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok.	2.500.000
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUSI	Tersedianya DPA Perubahan RKPD	1 dok.	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok.	2.000.000
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUSI	Tersedianya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKP, LPPD dan Iktip)	3 dok.	4.094.000				
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUSI	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 dok.	5.000.000				
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.835.517.448	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.495.615.291
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUSI	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	14 bulan	4.832.797.448	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 org/bulan	5.093.115.291
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUSI	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok.	2.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 lap	2.500.000
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				885.578.562	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			884.761.500
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUSI	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar gedung pasar	2 polis kendaraan, dan 3 polis bangunan gedung pasar	885.578.562	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	884.761.500
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-				
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	DISKUSI	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		-				
		Pengadaan pakalan Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		55.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		-				
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			265.660.000
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUSI	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 bin	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	10.000.000
2	2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUSI	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	64 jenis	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	40.000.000
3	2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUSI	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	27 jenis	25.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	15.000.000

4	2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUMKP	Terperluhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan kegiatan rapat internal kantor.	12 bin	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggantian mesin fotocopy.	Penyediaan barang cetakan dan penggantian mesin fotocopy.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	15.000.000
5	2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggantian mesin fotocopy.	DISKUMKP	Terperluhinya biaya pencetakan dan penggantian mesin fotocopy.	12 bin	25.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggantian mesin fotocopy.	Penyediaan barang cetakan dan penggantian mesin fotocopy.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian Mesin Fotocopy	12 paket	37.000.000
6	2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	DISKUMKP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 bin	25.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000
7	2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUMKP	Terperluhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bin	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	138.600.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				220.000.000					130.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUMKP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	12 bin	170.000.000	Pengadaan Meblur	Pengadaan Meblur	Jumlah paket Mebel yang di sediakan	5 paket/ unit	50.000.000
		Pengadaan Meblur	DISKUMKP	Jumlah Unit Meblur yang di sediakan	12 bin	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	15 unit	80.000.000
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.310.934.700					1.349.334.700
1	2.18.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUMKP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 bin	130.594.700	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 laporan	130.584.700
2	2.18.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUMKP		92 orang	1.380.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	13 laporan	1.218.750.000
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				377.500.000					412.039.308
1	2.18.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUMKP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	155.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dibayarkan pajaknya dan Perijannya	15 unit	155.000.000
2	2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUMKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijannya	16 unit	70.039.308
3	2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUMKP	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	1 jenis (komputer)	10.500.000	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	21 unit	10.000.000
4	2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan Mebel	DISKUMKP	Jumlah Pemeliharaan Mebel		10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	13 unit	10.000.000
5	2.18.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUMKP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	pasar (keboboran dll)	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	150.000.000
6	2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMKP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (CCTV da AC)	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	10.000.000
7	2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMKP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 jenis (gerobak sampah dan arca)	7.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	14 unit	7.000.000
2		KOPERASI DAN UKM				2.850.775.314					350.000.000
1		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				40.000.000			Persentase Koperasi yang berkualitas	18,68	25.000.000
1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				40.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			25.000.000
1	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, ketanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya koperasi di Kota Banjar	91 koperasi	40.000.000	Pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pengawasan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan pemeriksaan dan Pengawasan	38 koperasi	25.000.000
II		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI				65.000.000			Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai Keselamatannya untuk Koperasi dan Unit Simpan Pinjamnya dalam daerah kab/kota	27,47	25.000.000
1		Pelatihan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				65.000.000	Pelatihan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			25.000.000

1	2.17.04.2.01.01	2.17.05.2.01.01	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	25 Kop	65.000.000	65.000.000	Peleaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Kop	25.000.000
III											
1			KOTA BANJAR	Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkeroperasian yang telah dilaksanakan		171.100.000	171.100.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKEROPERASIAN	Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkeroperasian yang telah dilaksanakan		50.000.000
1			KOTA BANJAR	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah enggoptaan dalam daerah kabupaten/kota		171.100.000	171.100.000	Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah enggoptaan dalam daerah kabupaten/kota		50.000.000
1	2.17.05.2.01.01		KOTA BANJAR	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian dan Kompetensi SDM Koperasi	75 Orang	171.100.000	171.100.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian	50 org	50.000.000
				a. Pendidikan Perkeroperasian dan Manajemen Usaha		-	-				-
				b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : Jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		-	-				-
				c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi	120 Orang	-	-				-
	2.17.05.2.01.03		KOTA BANJAR	Terselenggaranya Reliatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar	75 Orang						
				Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kapasitas. SDM nyatorg)							
IV											
1						291.575.314	291.575.314	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000
1	2.17.06.2.01.01		KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	3 Event pameran dan 1 Kel Penerima Dana Hibah	291.575.314	291.575.314	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang produk, bernilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	8 unit	50.000.000
V											
1						683.100.000	683.100.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			150.000.000
1						683.100.000	683.100.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			150.000.000
			KOTA BANJAR	Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 dok				Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2 UMKM	10.000.000
			KOTA BANJAR	Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan	2 UMKM	50.000.000	50.000.000	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	100 Unit	10.000.000
1	2.17.07.2.01.02		KOTA BANJAR	Fasilitas kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan		50.000.000	50.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan Terhadap Usaha Mikro (pelatihan)	125 KUMKM	
2	2.17.07.2.01.04		KOTA BANJAR	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	125 KUMKM	300.000.000	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah orang yang telah melakukan Para Reordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	50 org	30.000.000
3	2.17.07.2.01.05		KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 keg	50.000.000	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Latihan	75 Orang	100.000.000

III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pertumbuhan nilai Ekspor	%	37.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pertumbuhan nilai Ekspor	%	55.000.000
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan nilai Ekspor		37.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan nilai Ekspor		55.000.000
1	3.30.05.2.01.01	Jumlah dokumen money	Dokumen	7.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 pelaku Usaha	-
		Jumlah Penerima Hibah	Kel					
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional	Eyccnt	30.000.000	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	10 Pelaku Usaha	30.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Dagang Lokal	Eyccnt		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	15.000.000
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan			Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	10.000.000
IV	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96,67	50.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	90,38	54.721.500
1	3.30.06.2.01.01	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	86,67	50.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	90,38	54.721.500
1	3.30.06.2.01.01	Tertayahnya tera/tera ulang alat UTTP	2600 UTTP	42.500.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, alat takar, alat timbang dan perengkapan yang Ditera Ulang	2350 UTTP	44.721.500
		Tertafasitasnya verifikasi alatstandar ukur ke Kementerian Perdagangan	1 dok		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang metrologi legal yang di bina	30 Pelaku Usaha	10.000.000
		Tersedianya Gedung metrologi	1 unit					
2	3.30.06.2.01.02	Tertaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar	5 kali	7.500.000				
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian esasan pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPN yang ditetapkan dalam RIPK		608.493.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPN yang ditetapkan dalam RIPK		545.000.000
1	3.31.02.2.01.01	Persentase terseleksikannya dokumen RIPIK merjadi PERDA		415.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terseleksikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya merjadi PERDA		520.000.000
1	3.31.02.2.01.01	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitas Hibah bagi Dekrenasda	Dokumen	45.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Penyelesaian Perda RIPK)	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyiapan, penyiapan dan perwilayahan industri	Dokumen	70.000.000	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyiapan, penyiapan dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyiapan, penyiapan dan perwilayahan industri (P5 Kawasan industri	1 Dokumen	

2	3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kali (40 IKM)	125.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, sarana dan Prasarana Industri (Fasilitasi alat HAKI yang Diskon 30%)	1 Dokumen	400.000.000
			KOTA BANJAR	Terdidinya mobil Kemasan	1 unit	-	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan GMP/Desain Kemasan)	1 Dokumen	120.000.000
3	3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan Desain Kemasan)	1kali (25 IKM)	175.000.000				
II		PROGRAM PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				165.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			15.000.000
	3.31.02.2.01.02	Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPU), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPK) Kewenangan Kabupaten Kota	KOTA BANJAR		Dokumen	165.000.000	Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPU), izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPK) Kewenangan Kabupaten Kota		1 Dokumen	15.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk kabupaten kota bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat resiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan		165.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPK Kewenangan kab/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha kecil dan industri menengah yang berfokus di satu kab/kota sepanjang menunjukkan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang Usaha tertentu yang menjadi kewenangan pusat. (Wasdal ke IKM)	1 Dokumen	5.000.000
1		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional				28.493.000	PROGRAM PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			10.000.000
1	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINAS	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	1 dok	28.493.000	Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya informasi industri	1 dok	10.000.000
		Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS				28.493.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS (Money IKM dan Sosialisasi SIINAS)	1 Dokumen	10.000.000
		Jumlah Anggaran OPD				11.917.278.364				9.707.351.424
		Terdiri dari :								
		Belanja Gaji Pegawai				4.832.797.448				5.493.115.291
		Belanja Kegiatan				7.084.480.916				4.214.236.133

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan, forum perangkat daerah, Musyawarah perencanaan pembangunan kota serta Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan atas hasil reses.

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan menindaklanjuti Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa) serta Daftar Usulan Kelurahan.

Dari berbagai usulan kecamatan yang berasal dari desa/kelurahan serta Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hasil reses, dapat dikelompokkan pada:

1. Usulan Permintaan modal
2. Pelatihan
3. Pendampingan/ Pembinaan usaha

Pada dasarnya semua usulan telah terakomodir dalam Renstra, adapun usulan permintaan modal diarahkan pada Bantuan JPE,

Dari total 29 usulan 23 diteruskan dan 6 usulan ditolak

Dari berbagai usulan dapat di kelompokkan menjadi 6 kelompok :

- Sarana Pemasaran /Outlet = 5 usulan (di Tolak) Pada tahun ini akan di bangun Galery sukma Kenanga dari anggaran Banprov

Senilai 2,3 M berlokasi di depan Pengadilan Negeri Kompleks perkantoran Purwaharja

- Pendampingan UMKM = 1 Usulan (di teruskan)
- Pelatihan GMP = 2 usulan (di teruskan)
- Kendaraan Promosi = 1 Usulan (di tolak)
- Bantuan Modal = 20 Usulan (di teruskan namun diarahkan di kegiatan Dana Bantuan JPE)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2021-2026, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi “Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“Naik Kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.” dengan misi terdiri atas :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan rnembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM,

Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
2. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
3. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
4. Tumbuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
5. Program OVOP berhasil.
6. Tumbuh dan kembangnya Koperasi berskala besar.

Penyusunan RPJPD 2025 - 2045 Provinsi Jawa Barat akan memegang 10 prinsip. Prinsip utama adalah SMART (Spesifik, Measurable / terukur, Achievable / bisa dicapai, Rasional, Tempo). Isu yang dibahas dalam RPJPD 2025 - 2045 meliputi pengentasan kemiskinan, pengangguran, gini rasio, tengkes (stunting), isu lingkungan, pelayanan dasar, blank spot akses internet hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Arah Kebijakan Daerah tahap kelima RPJPD (2023-2025) memberi arahan untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2025. Tahap kelima RPJPD yang merupakan tahap terakhir dari pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mencapai keunggulan Jawa Barat di segala bidang.

Pencapaian target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode RPJPD Jawa Barat diatas dilakukan melalui berbagai prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Prioritas pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemantapan koperasi dan usaha kecil dengan peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil, pengembangan struktur ekonomi koperasi dan usaha kecil serta penyerapan tenaga kerja dan investasi.

2. Bidang Perdagangan.

Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

3. Bidang Perindustrian.

Prioritas pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada penguatan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan memanfaatkan bahan baku terbarukan, penanganan industri ramah lingkungan, dan penguatan jaringan antar industri, didukung oleh pengembangan SDM industri yang berdaya saing.

Seiring dengan arah kebijakan nasional dan provinsi terdapat keterkaitan dengan arah **sasaran dan tujuan** Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha dalam meningkatkan daya saing dalam mengembangkan struktur ekonomi serta, meliputi keahlian di bidang

- managemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran;
3. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ;
 4. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM;
 5. Peningkatan daya saing untuk mendukung penanganan industry, penguatan jaringan antar industri;
 6. Stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok;
 7. Perdagangan elektronik (*e-commerce*);

2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk tiga tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukurakan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapka dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banjar menetapkan tujuan utama pembangunan bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas
2. Meningkatkan Kinerja dan Peran Pembangunan Koperasi Serta UMKM
3. Meningkatkan Peran dan Perdagangan Kota Banjar
4. Meningkatkan Daya Saing Industri Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran ditetapkan pula indikator sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (*targetnya*) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran utama yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan UMKM
3. Meningkatnya Peran Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Kota Banjar
4. Meningkatnya daya saing IKM

Sasaran keberhasilan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

MISI 3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tujuan : Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif

Sasaran : Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat

Indikator :

1. Pertumbuhan PDRB perkapita
2. Tingkat Inflasi daerah

MISI 6 : Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Tujuan 1: Menjadikan Kota Banjar sebagai daerah tujuan wisata

Sasaran 1.2 : Meningkatnya potensi Daerah Berbasis Agropolitan

Indikator : Cakupan Fasilitas Produk Unggulan Daerah (dalam satuan Produk Unggulan Daerah)

Selaras dengan RPD 2024 – 2026, indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP OPD
2. % Koperasi yang Berkualitas
3. % Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

5. % Pertumbuhan Nilai Ekspor
6. % Kapasitas Produksi IKM di Kota Banjar
7. % Investasi IKM di Kota Banjar

Tercapainya tujuan organisasi ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari segi SDM, pendanaan, sarana dan prasarana serta regulasi. Oleh karena itu integrasi yang selaras dari faktor-faktor tersebut sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi UKM dapat dilihat antara lain melalui 8 indikator di atas. Sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, diperlukan pelayanan birokrasi yang cepat dan berorientasi kepada kebutuhan serta kepuasan klien. Dengan demikian perlu dilakukan pula upaya pembinaan aparatur di jajaran Dinas Koperasi UKM untuk terus meningkatkan kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta sistem pengelolaan sampai dengan pelaporannya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, serta RPD Kota Banjar.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel. 9**.

Tabel 9
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE REK	RENCANA TAHUN 2025					PERKIRAAN MAJU 2026		
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING	TARGET/ VOLUME
1	2	3	4	5	6	7		6	7
		TOTAL				9.707.351.424			11.504.756.769
		SEKRETARIAT				8.549.910.799			8.138.825.720
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.549.910.799			8.138.825.720
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000			16.014.100
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUMKP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	3.000.000	APBD		2.644.400
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2.500.000	APBD		2.648.250
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUMKP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2.500.000	APBD		2.499.450
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya DPA Murni RKP	3 dok.	2.500.000	APBD		4.128.000
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya DPA Perubahan RKP	1 dok.	2.000.000	APBD		4.094.000
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUMKP	Tersedianya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKP)					
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUMKP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi					
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.495.615.291			4.835.517.448
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUMKP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	53 org/bulan	5.493.115.291			4.832.797.448
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUMKP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	2.500.000	APBD		2.720.000
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				884.761.500			884.761.500
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUMKP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	5 dokumen	884.761.500			884.761.500
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat							
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	DISKUMKP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUMKP	Jumlah paktr pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	-		0	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUMKP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan				0	

6		Administrasi Umum Perangkat Daerah					265.660.000			332.715.610
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUMIP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 paket		10.000.000	APBD		12.000.000
2	2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUMIP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	12 paket		40.000.000	APBD		40.000.000
3	2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUMIP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	12 paket		15.000.000	APBD		44.715.610
4	2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUMIP	Terperuhnya kebutuhan makan dan minum tamu dan kegiatan rapat internal kantor	12 paket		15.000.000	APBD		40.000.000
5	2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	DISKUMIP	Terperuhnya biaya pencetakan dokumen dan pengadaan	12 paket		37.000.000	APBD		35.000.000
6	2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUMIP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 Dokumen		10.000.000	APBD		26.000.000
7	2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUMIP	Terperuhnya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 laporan		138.660.000			135.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah					130.000.000			157.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				APBN		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	5 paket/ unit		50.000.000	APBN		37.000.000
		Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairiea yang di sediakan	15 unit		80.000.000			120.000.000
		Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan						
8		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintah Daerah					1.349.334.700			1.515.000.000
1	2.18.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUMIP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 laporan		130.584.700	APBD		135.000.000
2	2.18.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUMIP		13 laporan		1.218.750.000	APBD		1.380.000.000
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah					412.039.308			397.817.062
1	2.18.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUMIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit		155.000.000	APBD		150.000.000
2	2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUMIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 unit		70.039.308	APBD		52.817.062
3	2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUMIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit		10.000.000	APBD		15.000.000
		Pemeliharaan Mebel	DISKUMIP	Jumlah Pemeliharaan Mebel	13 unit		10.000.000			15.000.000
4	2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUMIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	4 unit		150.000.000	APBD		150.000.000
5	2.18.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	6 unit		10.000.000	APBD		10.000.000
6	2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	14 unit		7.000.000	APBD		5.000.000

2	17	KOPERASI DAN UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	KOTA BANJAR	Persentase Koperasi yang berkualitas	18,68	350.000.000	2.356.675.720
I								40.000.000
1			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terbinanya Koperasi di Kota Banjar	38 koperasi	25.000.000	40.000.000
1	2.17.03.2.01.01		Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000	40.000.000
II			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI					
1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
1	2.17.04.2.01.01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk	27,47	25.000.000	62.475.720
III			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
1			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
1	2.17.05.2.01.01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR	Jumlah KSP USP yang di nilai	40 Kop	25.000.000	62.475.720
			a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan		50.000.000	171.100.000
			b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya		Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		50.000.000	171.100.000
			c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi		Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		50.000.000	171.100.000
	2.17.05.2.01.03		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMKM di Kota Banjar			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatkan kafasitas SDM nya(org)			
IV			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
1			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	2.17.06.2.01.01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	8 unit	50.000.000	150.000.000
			a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator : Jumlah MoU Kerjasama					

V									150.000.000						333.100.000
1									150.000.000						333.100.000
									10.000.000						
									20.000.000						
1		2.17.07.2.01.02												APBD	50.000.000
2		2.17.07.2.01.04							20.000.000					APBD	50.000.000
3		2.17.07.2.01.05							100.000.000					APBD	233.100.000
VI									50.000.000						1.600.000.000
1									50.000.000					-	1.600.000.000
1		2.17.08.2.01.01							50.000.000					APBD	1.600.000.000

		PERDAGANGAN				262.440.625	438.500.000
I		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				82.719.125	108.500.000
1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48.500.000	48.500.000
1	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar	2 unit	48.500.000	48.500.000
2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				34.219.125	60.000.000
1	3.30.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		34.219.125	60.000.000
II		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				45.000.000	60.000.000
1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
1	3.30.04.2.01.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KOTA BANJAR				
2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				35.000.000	40.000.000
1	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	1 laporan	-	
2	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	124 laporan	15.000.000	20.000.000
3	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Terpenuhnya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	4 laporan	20.000.000	20.000.000
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	20.000.000
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	1 laporan	10.000.000	20.000.000
III		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				55.000.000	120.000.000
1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000	120.000.000
1	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota					
		Pameran Dagang Nasional		Jumlah Penerima Hibah	25 pelaku Usaha	-	
		Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	10 Pelaku Usaha	30.000.000	120.000.000
		Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	15.000.000	
				Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		10.000.000	

IV			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					90,38	54.721.500				75.000.000
1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah.vanz beraku	90,38	54.721.500				75.000.000
1	3.30.06.2.01.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR			Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2350 UTTP	44.721.500	APBD			65.000.000
				KOTA BANJAR			Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementrian Perdagangan	30 Pelaku Usaha	10.000.000	APBD			10.000.000
				KOTA BANJAR			Tersedianya Gedung metrologi			APBN			
2	3.30.06.2.01.02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR			Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar			APBD			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						25.000.000				75.000.000
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						25.000.000				75.000.000
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR			jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	5 UMKM	10.000.000				15.000.000
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten Kota	KOTA BANJAR			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi	2 UMKM	15.000.000				60.000.000
							545.000.000,00						

		PERINDUSTRIAN				545.000.000			570.755.329
I		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPK		520.000.000			420.000.000
1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesainya dokumen RPK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA		520.000.000			420.000.000
1	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Hibah bagi Dekranasda	1 Dokumen		APBD		45.000.000
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	KOTA BANJAR	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran	1 Dokumen		APBD		70.000.000
2	3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, sarana dan Terdedyina mobil kemasan	1 Dokumen	400.000.000	APBD		125.000.000
			KOTA BANJAR		1 Dokumen	120.000.000	BANPROV		180.000.000
3	3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan Desain, Kemasan)			APBD		
		PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI				15.000.000			130.000.000
4	3.31.03.2.01.02	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPK) Kewenangan Kabupaten Kota	KOTA BANJAR	1 Dokumen		15.000.000	APBD		130.000.000
					1 Dokumen	10.000.000			130.000.000
					1 Dokumen	5.000.000			
II		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI				10.000.000			20.755.329
1		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	10.000.000			20.755.329
1	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIInas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIInas	1 Dokumen	10.000.000	APBD		20.755.329

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/Subkegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/Subkegiatan antara lain :

- a. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024 – 2026
 - b. Rencana Stratgis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 – 2026.
 - c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan/Sub kegiatan
 - a. Jumlah program/kegiatan/Subkegiatan.
 - Program yang direncanakan sebanyak 15 program
 - Kegiatan yang direncanakan sebanyak 23 kegiatan
 - Subkegiatan yang direncanakan sebanyak 52 subkegiatan
 - b. Sifat penyebaran lokasi program/kegiatan/Subkegiatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tersebar ke berbagai kawasan dan tersebar pada seluruh kelompok masyarakat.
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 9.707.351.424,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, berdasarkan usulan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, usulan rencana kerja Perangkat Daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah. Program-program pembangunan daerah tersebut untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Banjar yang tertuang dalam Rencana Pemambangunan Daerah (RPD) Wali Kota Banjar tahun 2024 – 2026 yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dan Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah serta untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar.

Pada Tahun 2025 Dinas KUKMP berencana akan melaksanakan 15 Program terdiri dari Urusan rutin Sekretariat 1 Program, Urusan Perdagangan 5 Program Urusan Koperasi UKM 6 Proram dan Urusan Perindustrian 3 Program dengan total kebutuhan anggaran Rp. 9.707.351.424,-. Rencana Program Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar tahun 2025, dapat di lihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Rencana Program Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar tahun 2025

NO	KODE REK	RENCANA TAHUN 2025					PERKIRAAN MAJU 2026		
		URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUMBER ANGGARAN	CATATAN PENTING	TARGET/ VOLUME
1	2	3	4	5	6	7		6	7
		TOTAL				9.707.351.424			11.504.756.769
		SEKRETARIAT				8.549.910.799			8.138.825.720
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.549.910.799			8.138.825.720
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.500.000			16.014.100
1	2.18.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKUMKP	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD	1 dok.	3.000.000	APBD		2.644.400
2	2.18.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya RKA tahun n+1	1 dok.	2.500.000	APBD		2.648.250
3	2.18.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	DISKUMKP	Tersedianya RKA Perubahan tahun n	1 dok.	2.500.000	APBD		2.499.450
4	2.18.01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya DPA Murni RKP	3 dok.	2.500.000	APBD		4.128.000
5	2.18.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISKUMKP	Tersedianya DPA Perubahan RKP	1 dok.	2.000.000	APBD		4.094.000
6	2.18.01.02.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DISKUMKP	Tersedianya laporan dan realisasi kinerja kantor (LAKIP, LPPD dan LKP)					
7	2.18.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISKUMKP	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi					
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.495.615.291			4.835.517.448
1	2.18.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISKUMKP	Terpenuhinya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	53 org/bulan	5.493.115.291			4.832.797.448
2	2.18.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	DISKUMKP	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	2.500.000	APBD		2.720.000
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				884.761.500			884.761.500
1	2.18.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DISKUMKP	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	5 dokumen	884.761.500			884.761.500
5		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat							
1	2.18.01.02.05.11	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	DISKUMKP	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DISKUMKP	Jumlah paktr pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	-		0	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	DISKUMKP	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan				0	

6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													265.660.000					332.715.610	
1	2.18.01.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISKUMIP	Terwujudnya penerangan gedung kantor	12 paket		10.000.000	APBD												12.000.000	
2	2.18.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISKUMIP	Terlayannya kebutuhan alat tulis kantor	12 paket		40.000.000	APBD												40.000.000	
3	2.18.01.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	DISKUMIP	Terlayannya kebutuhan peralatan rumah tangga dan spanduk	12 paket		15.000.000	APBD												44.715.610	
4	2.18.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	DISKUMIP	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan kegiatan rapat internal kantor	12 paket		15.000.000	APBD												40.000.000	
5	2.18.01.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	DISKUMIP	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan pengandaan	12 paket		37.000.000	APBD												35.000.000	
6	2.18.01.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISKUMIP	Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	12 Dokumen		10.000.000	APBD												26.000.000	
7	2.18.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	DISKUMIP	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 laporan		138.660.000													135.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													130.000.000					157.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			APBN												-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	5 paket/ unit		50.000.000	APBN													37.000.000
		Pengadaan Mabler		Jumlah Unit Meblairaa yang di sediakan	15 unit		80.000.000														120.000.000
		Pengadaan Asset Tak berwujud		Jumlah unit Asset Tak berwujud yang di sediakan																	
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.349.334.700					1.515.000.000	
1	2.18.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKUMIP	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	12 laporan		130.584.700	APBD													135.000.000
2	2.18.01.02.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DISKUMIP		13 laporan		1.218.750.000	APBD													1.380.000.000
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													412.039.308					397.817.062	
1	2.18.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISKUMIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit		155.000.000	APBD													150.000.000
2	2.18.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKUMIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 unit		70.039.308	APBD													52.817.062
3	2.18.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DISKUMIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit		10.000.000	APBD													15.000.000
4	2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan Mebel	DISKUMIP	Jumlah Pemeliharaan Mebel	13 unit		10.000.000														15.000.000
5	2.18.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	DISKUMIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	4 unit		150.000.000	APBD													150.000.000
6	2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	6 unit		10.000.000	APBD													10.000.000
6	2.18.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISKUMIP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	14 unit		7.000.000	APBD													5.000.000

2	17	KOPERASI DAN UKM			Persentase Koperasi yang berkualitas	18,68	350.000.000	2.356.675.720
I		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000	40.000.000
1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR				25.000.000	40.000.000
1	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Keukuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR		Terbinanya koperasi di Kota Banjar	38 koperasi	25.000.000	40.000.000
II		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI					25.000.000	62.475.720
1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam I (Snu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi	27,47	25.000.000	62.475.720
1	2.17.04.2.01.01	Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ kota	KOTA BANJAR		Jumlah KSP USP yang di nilai	40 Kop	25.000.000	62.475.720
III		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000	171.100.000
1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR		Persentase Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian yang telah dilaksanakan Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah sanggataan dalam daerah kabupaten/kota		50.000.000	171.100.000
1	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	KOTA BANJAR		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 org	50.000.000	171.100.000
		a. Pendidikan Perkoperasian dan Manajemen Usaha			Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		b. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengelola dan Pengurus Koperasi indikator : jumlah pengurus koperasi yang ditingkatkan wawasannya			Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		c. Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi						
		Jumlah Peserta Sosialisasi Koperasi indikator :						
	2.17.05.2.01.03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR		Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UMK/UM di Kota Banjar			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			Jumlah pelaku Usaha Mikro yang di tingkatakan kapasitas SDM nya(org)			
IV		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000	150.000.000
1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR				50.000.000	150.000.000
1	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR		Jumlah Event pameran dan Penerima Dana Hibah	8 unit	50.000.000	150.000.000
					a. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi indikator :			
					Jumlah MoU Kerjasama			
V		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					150.000.000	333.100.000
1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	KOTA BANJAR		Jumlah penerima program Banjar Produktif yang di verifikasi (Orang)/Jumlah Dokumen Usaha Mikro	2 UMKM	10.000.000	
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Jumlah Usaha mikro yg bermitra	100 Unit	20.000.000	
1	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	KOTA BANJAR		Jumlah Perizinan usaha yang diterbitkan	125 KUM/KM	20.000.000	50.000.000
2	2.17.07.2.01.04	Facilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro yang di terbitkan	KOTA BANJAR		Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	50 org	20.000.000	50.000.000
3	2.17.07.2.01.05	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KOTA BANJAR		Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan	75 Orang	100.000.000	233.100.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	KOTA BANJAR		Jumlah pelatihan dan peningkatan di tingkat kefasitasan SDM nya(org)			
VI		PROGRAM PENGEMBANGAN UMK/UM			Persentase Usaha mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	3%	50.000.000	1.600.000.000
1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	KOTA BANJAR			-	50.000.000	1.600.000.000
1	2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KOTA BANJAR		Jumlah Usaha mikro yang di beri stimulan		50.000.000	1.600.000.000

		PERDAGANGAN					262.440.625		438.500.000
I		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					82.719.125		108.500.000
1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					48.500.000		48.500.000
1	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		KOTA BANJAR	Terfasilitasinya lahan tanah PT KAI yg digunakan oleh pasar Banjar	2 unit	48.500.000	APBD	48.500.000
2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya					34.219.125		60.000.000
1	3.30.03.2.02.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		KOTA BANJAR	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan		34.219.125	APBD	60.000.000
II		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					45.000.000		60.000.000
1		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
1	3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		KOTA BANJAR					
2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					35.000.000		40.000.000
1	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		KOTA BANJAR	Tersedianya data IHK	1 laporan	-	APBD	
2	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		KOTA BANJAR	Tersedianya data harga sembako dan barang strategis lainnya	124 laporan	15.000.000	APBD	20.000.000
3	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		KOTA BANJAR	Terpenuhinya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	4 laporan	20.000.000	APBD	20.000.000
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di TK daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		20.000.000
		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi		KATA BANJAR	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	1 laporan	10.000.000		20.000.000
III		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					55.000.000		120.000.000
1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					55.000.000		120.000.000
1	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota			Jumlah dokumen money	25 pelaku Usaha	-	APBD	
		Pameran Dagang Nasional			Jumlah Penerima Hibah	10 Pelaku Usaha	30.000.000	APBD	120.000.000
		Pameran Dagang Lokal			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Pelaku Usaha	15.000.000	APBD	
		Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	10.000.000		
					Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				

IV			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															75.000.000
1			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah.vanz.beraku	90,38	54.721.500									75.000.000
1	3.30.06.2.01.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	KOTA BANJAR			Terlayannya tera/tera ulang alat UTTP	2350 UTTP	44.721.500	APBD								65.000.000
				KOTA BANJAR			Terfasilitasinya verifikasi alat standar ukur ke Kementerian Perdagangan	30 Pelaku Usaha	10.000.000	APBD								10.000.000
				KOTA BANJAR			Tersedianya Gedung metrologi			APBN								
2	3.30.06.2.01.02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	KOTA BANJAR			Terlaksananya pengawasan penggunaan alat UTTP di Kota Banjar			APBD								
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						25.000.000									75.000.000
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						25.000.000									75.000.000
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR			umlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	5 UMKM	10.000.000									15.000.000
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten Kota	KOTA BANJAR			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa Akomodasi	2 UMKM	15.000.000									60.000.000
							545.000.000,00											

		PERINDUSTRIAN				545.000.000			570.755.329
I		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOTA BANJAR	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPK		520.000.000			420.000.000
1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	KOTA BANJAR	Persentase terselesainya dokumen RPK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA		520.000.000			420.000.000
1	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Fasilitas Hibah bagi Dekranasda	1 Dokumen		APBD		45.000.000
	3.31.02.2.01.002	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	KOTA BANJAR	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran	1 Dokumen		APBD		70.000.000
2	3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	KOTA BANJAR	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, sarana dan Terdedyina mobil kemasan	1 Dokumen	400.000.000	APBD		125.000.000
			KOTA BANJAR		1 Dokumen	120.000.000	BANPROV		180.000.000
3	3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	KOTA BANJAR	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Pelatihan Desain, Kemasan)			APBD		
		PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI				15.000.000			130.000.000
4	3.31.03.2.01.02	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPK) Kewenangan Kabupaten Kota	KOTA BANJAR	1 Dokumen		15.000.000	APBD		130.000.000
					1 Dokumen	10.000.000			130.000.000
					1 Dokumen	5.000.000			
II		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI				10.000.000			20.755.329
1		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya informasi Industri	1 dok	10.000.000			20.755.329
1	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIInas	KOTA BANJAR	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIInas	1 Dokumen	10.000.000	APBD		20.755.329

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai perencanaan kinerja dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap subkegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap sub kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintahan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar ini sebagai acuan kerja Perangkat daerah tahun 2025. Semoga Allah SWT selalu melindungi langkah kita . Aamiin ya robbal alamiin...



Banjir, 05 Juli 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kota Banjar

Hj. SP SOPARIAH, S.E, M.E, M.M.
Pembona Utama Muda, Iv/C
NIP. 19740423 199902 2 001